

## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan dalam tiga (3) poin utama. Pertama, kerja sama *Country Programme Indonesia 2012-2015* dalam program pemberantasan korupsi memiliki dua *stakeholders* utama, yaitu Institusi Antikorupsi Lokal dan Internasional. Dalam Institusi Antikorupsi Lokal terdiri dari (1) organisasi pemerintah seperti: KPK, Kejaksaan, Polri, BPK dan PPATK serta (2) organisasi non-pemerintah seperti: ICW, TII dan Kemitraan. Sedangkan, Institusi Antikorupsi Internasional yang terlibat adalah UNODC. Kedua *stakeholders* tersebut bekerja sama untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan kapasitas pembangunan di Indonesia agar tidak terhambat oleh korupsi dengan mereformasi birokrasi dan pemerintahan serta menerapkan ketiga prinsip lintas sektoral tentang politik, hukum dan keamanan, serta kesejahteraan rakyat.

Kedua, UNODC sebagai institusi internasional, memiliki peran untuk menentukan dan merealisasikan tujuan kolektif, yaitu pemberantasan korupsi secara global, termasuk Indonesia. Dalam kerja sama ini, UNODC dan Institusi Antikorupsi Lokal bekerja sama untuk (1) mengidentifikasi dan menginvestigasi praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan pemerintah; (2) meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam memberantas korupsi; dan (3) mengidentifikasi serta menindak aktivitas pencucian uang dan pemulihan aset. UNODC memberikan bantuan berupa dana, pelatihan dan seminar, serta bantuan teknis untuk Indonesia dalam upaya

mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan lebih efektif. Target-target tersebut sejalan dengan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas-PK) Indonesia.

Ketiga, kerja sama ini menghasilkan peningkatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu: (1) meningkatnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia; (2) meningkatnya jumlah penyelamatan uang negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan; (3) meningkatnya kesadaran masyarakat akan korupsi yang terjadi di Indonesia, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai gerakan antikorupsi di Indonesia; (4) meningkatnya Indeks Integritas Nasional (IIN) Pemerintah Indonesia, yang mengindikasikan bahwa terdapat upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan integritasnya; (5) meningkatnya peran dan kontribusi *civil society organizations* (CSOs) dalam pemberantasan korupsi, hal ini diindikasikan dengan adanya berbagai rekomendasi kebijakan antikorupsi yang dirumuskan oleh organisasi antikorupsi non-pemerintah; (6) meningkatnya respon penegak hukum atau kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia; dan (7) Indonesia berhasil dijadikan sebagai *best practices* dalam pemberantasan korupsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa melalui kerja sama *Country Programme Indonesia 2012-2015*, Institusi Antikorupsi Lokal dengan Internasional telah berhasil meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama dengan meningkatnya skor IPK Indonesia, respon penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dan Indonesia dijadikan sebagai *best*

*practices* dalam pemberantasan korupsi oleh PBB. Kerja sama internasional berperan penting dalam merealisasikan tujuan kolektif, termasuk dalam pemberantasan korupsi secara global. Negara yang memiliki kapasitas minim dalam melawan korupsi memiliki kesempatan untuk mereformasi sistem demokrasi, meningkatkan kompetisi ekonomi dan meningkatkan kualitas birokrasi dengan bantuan dari negara atau institusi lain. Dengan tercapainya poin-poin tersebut, memiliki pengaruh terhadap pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warga negaranya, termasuk dalam peningkatan pembangunan ekonomi, sosial, politik dan hukum.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Anwar, S. *Perang Melawan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Institut Pengkajian Masalah-Masalah Politik dan Sosial Ekonomi. 2012.
- Archer, Clive. *International Organizations 3<sup>rd</sup> Edition*. London: Routledge, 2001.
- Burchill, Scott Burchill et al. *Theories of International Relations 3<sup>rd</sup> Edition*. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Burchill, Scott. *Theories of International Relations 2<sup>nd</sup> Edition*. USA: Palgrave Macmillan, 2001.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4<sup>th</sup> Edition*. California: SAGE Publications, Inc., 2013.
- Dougherty James E. dan Robert L. Pfaltzgraff, JR. *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. United States: Addison Wesley Longman, Inc., 2001.
- Dunne, Tim, Milja Kurki, dan Steve Smith. *International Relations Theory 3<sup>rd</sup> Edition*. United Kingdom: Oxford University Press, 2013.
- Elliott, Kimberly Ann. *Corruption and the Global Economy*. Washington: Institute for International Economy, 1997.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches 5<sup>th</sup> Edition*. New York: Oxford, 2010.
- Maheka, Arya. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Nurdjana, IGM. *Korupsi dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Peet, Richard dan Elaine Hartwick. *Theories of Development 3<sup>rd</sup> Edition*. New York: The Guilford Press, 2015.
- Rose-Ackerman, Susan. *Korupsi dan Pemerintahan: Sebab, Akibat dan Reformasi*. UK: Cambridge University Press, 2000.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. *Economic Development 12<sup>th</sup> Edition*. United States: Pearsons, 2015.
- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. *International Relations Theory 5<sup>th</sup> Edition*. United States: Pearson, 2012.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT Gramedia, 2009.
- Williams, Robert, Jonathan Moron dan Rachel Flanery. *Corruption in The Developed World*. UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2000.
- Winarno, Budi. *Globalisasi Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*. Indonesia: Erlangga, 2008.

**Jurnal**

- “International Cooperation Against Corruption.” *Corruption Assessment Report 2001*, (2001).
- Abdullah, Junaidi. “Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga enanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2014).
- Ampratwum, Edward Fukuoh. “The Fight Against Corruption and Its Implications for Development in Developing and Transition Economies.” *Journal on Money Laundering* 11, no. 1 (2008).
- Disch, Arne Disch et al. “Anti-Corruption Approaches: A Literature Review.” *Joint Evaluation*, (2009).
- Harahap, M. Rudy. *Strategies for Preventing Corruption in Indonesia*. Australia: Australia University Press, 1999.
- Joy, Ajit. “Opening Remarks of Session II.” *Impact of Corruption on The Environment and the United Nations Convention Against Corruption*. 2011.
- Keohane, Robert dan Lisa L. Martin. “The Promise of Institutional Theory.” *Journal of International Security* 20, no. 1 (1995).
- Klitgaard, Robert. “International Cooperation Against Corruption.” *Internet Center for Corruption Research*, (1998).
- Mauro, Paolo. “Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure: A Cross-Country Analysis.” *Corruption and The Global Economy*, (1997).
- Palmia, Alvon Kurnia Palmia, Lais Abid, Sely Martini, Hifdzil Alim dan Febri Diansyah. *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment*. Jakarta: ICW, 2014.
- Prabowo, Hendi Yogi. “Sight beyond sight: Foreseeing corruption in Indonesian government through behavioral analysis.” *Journal of Financial Crime* 23, no. 2 (2016).
- Prabowo, Hendi Yogi. “To Be Corrupt or Not To Be Corrupt: Understanding the behavioral side of corruption in Indonesia.” *Journal of Money Laundering Control* 17, no.3 (2014).
- Pradiptyo, Rimawan. “Korupsi Struktural: Analisis Database Korupsi Versi 4 (2001-2015).” *Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM)*, (2016).
- Rahayuningsih, Toetik. “Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga dalam Menanggulangi *Money Laundering* di Indonesia.” *Yuridika* 28, no. 3 (2013).
- Salifu, Adam. “Can corruption and economic crime be controlled in developing countries – if so, is it worth the cost?” *Journal of Money Laundering Control* 11, no. 3 (2008).
- Sina, La. “Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, no. 1 (2008).
- Transparency International. “Causes of Corruption in Indonesia.” *Transparency International*. 2012.
- Utomo, Syahtri Kurnia. “Peran United Nations Office on Drugs and Crime

(UNODC) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia tahun 2009-2014.” *JOM FISIP* 2, no.2 (2015): 12.

### **Laporan Resmi**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perguruan Tinggi. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2011.

Kemitraan. Laporan Tahunan (Laporan 2012). Jakarta: Kemitraan, 2012.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Tahunan KPK* (Laporan 2016). Jakarta, Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016.

KPK, Kejaksaan dan Polri. “Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Laporan yang Dipublikasikan secara Formal, 29 Maret 2017.

Organisation for Economic Co-operation and Development. *Government at A Glance 2017* (Laporan 2017). Paris, Perancis: OECD, 2017.

Organisation for Economic Co-operation and Development. *OECD Investment Policy Reviews: Indonesia* (Laporan 2010). Paris, Perancis: OECD, 2010.

*Sensitisasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), Stranask PPK dan Inpres No. 1 Tahun 2013 di Indonesia* (Laporan 2013). DKI Jakarta, Indonesia, 2013.

Transparency International Indonesia. *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017* (Laporan 2017). DKI Jakarta, Indonesia: Transparency International Indonesia, 2017.

Transparency International. *Global Corruption Report* (Laporan 2014). Jerman: Transparency International, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

United Nations Development Programme. *UNDP Support to the Implementation of the Sustainable Development Program* (Laporan 2016). UNDP, 2016.

United Nations Office on Drugs and Crime. *Country Programme Indonesia 2012-2015* (Laporan 2015). Jakarta, Indonesia: UNODC, 2015.

United Nations. *UN System Task Team on The Post-2015 UN Development Agenda* (Laporan 2015). United Nations, 2016.

United Nations. *United Nations Convention Against Corruption* (Laporan 2004). New York: United Nations, 2004.

World Bank. *Combating Corruption in Indonesia: Enhancing Accountability for Development* (Laporan 2003). World Bank, 2003.

World Bank. *Combating Corruption in Indonesia: Enhancing Accountability for Development* (Laporan 2003). World Bank, 2003.

### Presentasi

Samad, Abraham. "Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi." Di *Acara Kuliah Perdana Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 September 2013*. Indonesia: 2013.

### Website

- "About UNODC." *United Nations Office on Drugs and Crime*. Diakses 26 Oktober 2017. <https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html>.
- "Akibat Korupsi, Uang Negara Menguap Rp168,19 Triliun." *Tempo*. Diakses 9 Oktober 2017. <https://nasional.tempo.co/read/464996/akibat-korupsi-uang-negara-menguap-rp16819-triliun>.
- "Akibat Korupsi, Uang Negara Menguap Rp168,19 Triliun." *Tempo*. Diakses 9 Oktober 2017. <https://nasional.tempo.co/read/464996/akibat-korupsi-uang-negara-menguap-rp16819-triliun>.
- "Cegah Pengusaha Menyuap, KPK Deklarasikan Profit." *Tempo*. Diakses 2 Desember 2017. <https://nasional.tempo.co/read/812723/cegah-pengusaha-menyuap-kpk-deklarasikan-profit>.
- "Choel Mallarangeng Didakwa Terima Rp 4 M dari Proyek Hambalang." *Kumparan*. Diakses 10 Oktober 2017. <https://kumparan.com/muhamad-rizki/choel-mallarangeng-didakwa-terima-rp-4-m-dari-proyek-hambalang?ref=mbody>.
- "Corruption Global Barometer 2017." *Transparansi Internasional Indonesia*. Diakses 19 Oktober 2017. <http://riset.ti.or.id/global-corruption-barometer-2017/>.
- "Corruption in Indonesia." *Indonesia-Investments*. Diakses 5 Oktober 2017. <https://www.indonesia-investments.com/business/risks/corruption/item235?>
- "Corruption Perception Index: In Detail." *Transparency International*. Diakses 28 September 2017. [https://www.transparency.org/IPK2014/in\\_detail#myAnchor9](https://www.transparency.org/IPK2014/in_detail#myAnchor9).
- "Corruption Perceptions Index 2016." *Transparency International Indonesia*. Diakses 13 September 2017. <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption-perceptions-index-2016>.
- "Diskusi Panel Peran BPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*. Diakses 27 Oktober 2017. <http://www.bpk.go.id/news/diskusi-panel-peran-bpk-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>.
- "Fungsi dan Tugas KPK." *Komisi Pemberantasan Korupsi*. Diakses 25 Oktober 2017. <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas>.
- "Gerakan 'Saya Perempuan Anti-Korupsi' Meraih Penghargaan IACEA." *Komisi Pemberantasan Korupsi*. Diakses 2 Desember 2017. <http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/4133-gerakan-saya-perempuan-anti-korupsi-meraih-penghargaan-iacea>.
- "ICW Adalah." *Indonesia Corruption Watch*. diakses 20 November 2017.

- <https://antikorupsi.org/content/siapa-icw>.
- “ICW: Kasus Korupsi Non-Infrastruktur Didominasi Sektor Keuangan Daerah.” *Harian Terbit*. Diakses 10 Oktober 2017.  
<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/10/13/44213/25/25/ICW-Kasus-Korupsi-Non-Infrastruktur-Didominasi-Sektor-Keuangan-Daerah>.
- “ICW: Sektor Transportasi Paling Banyak Dikorupsi.” *Warta Ekonomi*. Diakses 10 Oktober 2017. <https://www.wartaekonomi.co.id/read75084/icw-sektor-transportasi-paling-banyak-dikorupsi.html>.
- “Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2017.” *Badan Pusat Statistik*. Diakses 18 Oktober 2017.  
<https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>.
- “Indikator Keberhasilan.” *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*. Diakses 16 November 2017.  
<http://stranasppk.bappenas.go.id/indikator-keberhasilan.html>.
- “Indonesia.” *Transparency International*. Diakses 30 September 2017.  
<https://www.transparency.org/country/IDN>.
- “Indonesia Corruption Is Hurting Foreign Investment: Standard and Poor’s.” *Jakarta Globe*. Diakses 20 Oktober 2017.  
<http://jakartaglobe.id/archive/indonesian-corruption-is-hurting-foreign-investment-standard-poors/>.
- “Inilah Penyebab Mengapa Korupsi Sulit Diberantas.” *Republika*. Diakses 19 Oktober 2017. [http://www.republika.co.id/amp\\_version/m8s40k](http://www.republika.co.id/amp_version/m8s40k).
- “Kinerja Polisi dan Kejaksaaan dalam Pemberantasan Korupsi 2004-2015.” *Katadata*. Diakses 2 Desember 2017.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/08/kinerja-polisi-dan-kejaksaaan-dalam-pemberantasan-korupsi-2004-2015>.
- “Koordinasi-Supervisi KPK Belum Berjalan Maksimal.” *Indonesia Corruption Watch*. Diakses 2 Desember 2017.  
<https://antikorupsi.org/id/news/koordinasi-supervisi-kpk-belum-berjalan-maksimal>.
- “Korupsi Masih Menjadi Penghalang Investasi.” *Merdeka*. Diakses 19 Oktober 2017. <http://www.merdeka.com/uang/korupsi-masih-jadi-penghalang-investasi.html>.
- “Latar Belakang.” *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*. Diakses 16 November 2017. <http://stranasppk.bappenas.go.id/latar-belakang.html>.
- “Mengenal Gerakan Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK).” *Komisi Pemberantasan Korupsi*. Diakses 2 Desember 2017.  
<https://acch.kpk.go.id/id/ragam/saya-perempuan-antikorupsi/mengenal-gerakan-saya-perempuan-anti-korupsi-spak>.
- “Nilai Penyelamatan Uang Negara Oleh KPK 2005-2015.” *Beritagar*. Diakses 3 Desember 2017. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/nilai-penyelamatan-uang-negara-oleh-kpk-2005-2016-1503469291>.
- “Nilai Penyelamatan Uang Negara 2004-2016.” *Beritagar*. Diakses 3 Desember



2017. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/nilai-penyelamatan-uang-negara-2004-2016-1503544389>.
- “Organizational Structure.” *United Nations Office on Drugs and Crime*. Diakses 28 Oktober 2017. <https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/organizational-structure-of-unodc.html>.
- “Organized Crime.” *United Nations Office on Drugs and Crime*. Diakses 2 September 2017. [https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html#what\\_organized\\_crime](https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html#what_organized_crime).
- “Para ahli lokal adalah kunci keberlanjutan Proyek Kejahatan Transnasional dan Peradilan Pidana.” *United Nations Office on Drugs and Crime*. Diakses 2 Desember 2017. <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2011/06/national-faculty/ind/story.html>.
- “Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir.” *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Diakses 27 Agustus 2017. <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Terorganisir.aspx>.
- “Profil.” *Transparency International Indonesia*. Diakses 20 November 2017. <http://ti.or.id/profil/>.
- “Sambutan Kepala PPATK.” *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*. Diakses 28 Oktober 2017. <http://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>.
- “Sejarah.” *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*. Diakses 27 Oktober 2017. <http://bpk.go.id/page/sejarah>.
- “Sekilas KPK.” *Komisi Pemberantasan Korupsi*. Diakses 25 Oktober 2017. <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>.
- “Signature and Ratification Status.” *United Nations Office on Drugs and Crime*. Diakses 22 November 2017. <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html>.
- “Statistik Tindak Pidana Korupsi.” *Komisi Pemberantasan Korupsi*. Diakses 2 Desember 2017. <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>.
- “Tindak Pidana Korupsi.” *Komisi Pemberantasan Korupsi*. Diakses 20 November 2017. <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>.
- “Tingkatkan Performa, KPK Timba Ilmu dari UNODC.” *Detik News*. Diakses 2 Desember 2017. <https://news.detik.com/berita/2112559/tingkatkan-performa-kpk-timba-ilmu-dari-unodc>.
- “Transparency International Indonesia and UNODC Establish an Anti-Corruption Forum.” *United Nations Office on Drugs and Crime*. Diakses 2 Desember 2017. <https://www.unodc.org/indonesia/2011/01/ac-forum-indonesia/story.html>.
- “Trust in Government.” *OECD*. Diakses 19 Oktober 2017. <http://www.oecd.org/gov/trust-in-government.htm>.
- “Tugas dan Wewenang.” *Kejaksaan Republik Indonesia*. Diakses 29 Oktober 2017. [https://kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=7](https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=7).
- “UNODC and Indonesian Agency Team Up to Fight Corruption.” *United Nations*

- Office on Drugs and Crime*. Diakses 30 November 2017.  
<https://www.unodc.org/indonesia/2009/12/anti-corruption-day-indonesia/story.html>.
- “UNODC Dukung “Training for Trainers” untuk Gerakan Perempuan Lawan Korupsi.” *United Nations Information Center Jakarta*. Diakses 2 Desember 2017. <http://www.unicjakarta.org/unodc-dukung-ldquotraining-for-trainers-pelatihan-untuk-pelatihrdquo-untuk-gerakan-perempuan-lawan-korupsi.html>.
- “UNODC’s Action Against Corruption and Economic Crime.” *United Nations Office on Drugs and Crime*. Diakses 5 Maret 2017.  
<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/>.
- “Visi dan Misi Polri.” *Kepolisian Republik Indonesia*. Diakses 27 Oktober 2017.  
<https://www.polri.go.id/tentang-visimisi.php>.
- “Visi dan Misi.” *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*. Diakses 16 November 2017. <http://stranasppk.bappenas.go.id/visi-dan-misi.html>.
- Adzkia, Aghnia. “Beda Jurus Korupsi Era Soeharto dan Reformasi.” *CNN Indonesia*. Diakses 6 Maret 2017.  
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150521153708-74-54824/beda-jurus-korupsi-era-soeharto-dan-reformasi/>.
- Akbar, Hikmatul dan Regina Dècor Carmeli. “Konvensi Anti Korupsi PBB dan Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi ke Indonesia.” Diakses 16 Februari 2017.  
[http://repository.upnyk.ac.id/8159/2/Hikmatul\\_Akbar\\_Carmeli\\_Konvensi\\_Anti\\_Korupsi\\_PBB.pdf](http://repository.upnyk.ac.id/8159/2/Hikmatul_Akbar_Carmeli_Konvensi_Anti_Korupsi_PBB.pdf).
- Aziz, Abdul. “Membongkar Korupsi Proyek Infrastruktur.” *Tirto*. Diakses 9 Oktober 2017. <https://tirto.id/membongkar-korupsi-proyek-infrastruktur-cfke>.
- Belarminus, Robertus. “Penyidikan Kasus Suap Mantan Dirut Garuda Indonesia Masih Dilakukan.” *Kompas*. Diakses 20 Oktober 2017.  
<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/17/10015291/penyidikan.kasus.suap.mantan.dirut.garuda.indonesia.masih.dilakukan..>
- Erdianto, Kristian. “Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Pemberantasan Korupsi Dinilai Jauh dari Harapan.” *Kompas*. Diakses 17 Oktober 2017.  
<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/20/17213221/dua.tahun.pemerintahan.jokowi-jk.pemberantasan.korupsi.dinilai.jauh.dari.harapan.>
- Gabrillin, Abba. “Suap Akil Mochtar, Bupati Terpilih Buton Dituntut 5 Tahun Penjara.” *Kompas*. Diakses 18 Oktober 2017.  
<http://nasional.kompas.com/read/2017/09/06/14271171/suap-akil-mochtar-bupati-terpilih-buton-dituntut-5-tahun-penjara.>
- Santosa, Iwan. “Korupsi, dari Kerajaan Nusantara hingga Reformasi.” *Kompas*. Diakses 6 Maret 2017.  
<http://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari.Kerajaan.Nusantara.hingga.Reformasi.>
- Santosa, Iwan. “Korupsi, dari Kerajaan Nusantara hingga Reformasi.” *Kompas*. Diakses 6 Maret 2017.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari.Kerajaan.Nusantara.hingga.Reformasi>.

Supriyadi, Eko. "Korupsi di Era Reformasi Semakin Merajalela." *Republika*. Diakses 6 Maret 2017. <http://www.republika.co.id/berita/mpr-ri/berita-mpr/15/12/22/nzrjs2365-korupsi-di-era-reformasi-semakin-merajalela>.

Supriyadi, Eko. "Korupsi di Era Reformasi Semakin Merajalela." *Republika*. Diakses 6 Maret 2017. <http://www.republika.co.id/berita/mpr-ri/berita-mpr/15/12/22/nzrjs2365-korupsi-di-era-reformasi-semakin-merajalela>.

Syarif, Mohar. "ICW: Sektor Transportasi Paling Banyak Dikorupsi." *Neraca*. Diakses 9 Oktober 2017. <http://www.neraca.co.id/article/59818/icw-sektor-transportasi-paling-banyak-dikorupsi#!/auth>.

"Korupsi Membuat Indonesia Terempas." *KPK*. Diakses 26 September 2017. <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2951-korupsi-membuat-indonesia-terempas>.

"Overview." *Transparency International*. Diakses 20 November 2017. <https://www.transparency.org/whoweare/organisation>.

"About Us." *Kemitraan*. Diakses 21 November 2017. <http://www.kemitraan.or.id/who-we-are/>.

Kuwado, Fabian Januarius. "Negara Rugi Rp 2,3 Triliun di Proyek E-KTP, KPK Yakin Hanya Kembali Setengahnya." *Kompas*. Diakses 17 Oktober 2017. <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/15/11144951/negara-rugi-rp-2-3-triliun-di-proyek-e-ktp-kpk-yakin-hanya-kembali>.